

# Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional

*by 33*

---

**Submission date:** 13-Jun-2023 03:33PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2115119757

**File name:** 3.pdf (270.28K)

**Word count:** 3335

**Character count:** 22070

## Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional

Widhiya Ninsiana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iring Muhyo, Metro Timur Kota Metro

Email: widhiya.ninsiana@metrouniv.ac.id

Diterima: 10 September 2017

Revisi: 25 Oktober 2017

Disetujui: 4 Desember 2017

### Abstract

The sacred mission of education as stipulated in the motto of Indonesian Higher Education, which is to implement tridharma concept (education, research, and community service). However, looking at the current reality, it will be difficult for us to see our PT being able to successfully implement the tridharma. This paper attempts to criticize our higher education which has unwittingly long ago developed into an agent of capitalism that perpetuates the system of capitalism in the practice of administration and policy of the higher education in Indonesia. Radicalism in education has been a potential futuristic threat to realize the quality of education. Radicalism may arise at any time, from anywhere and can be carried out by anyone, including by higher education institutions and government through various policy issued as Permenistek Dikti. Therefore radicalism needs to be fully integrated and comprehensively undertaken through constructive steps (deradicalisation) so that it can perform synergy neatly and precisely and relies on the paradigm and purpose of education itself.

Keywords: radicalism; deradicalization; Higher level of education; policy; capitalism

### Abstrak

Misi pendidikan suci sebagaimana ditetapkan dalam moto Pendidikan Tinggi Indonesia, yaitu menerapkan konsep tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Namun, melihat kenyataan saat ini, akan sulit bagi kita untuk melihat PT kita berhasil menerapkan tridharma tersebut. Makalah ini mencoba mengkritik pendidikan tinggi kita yang tanpa disadari telah lama berkembang menjadi agen kapitalisme yang melanggengkan sistem kapitalisme dalam praktik administrasi dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Radikalisme dalam pendidikan telah menjadi ancaman potensial futuristik untuk mewujudkan kualitas pendidikan. Radikalisme dapat muncul setiap saat, dari mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh institusi pendidikan tinggi dan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan sebagai Permenistek Dikti. Oleh karena itu radikalisme perlu diintegrasikan secara komprehensif dan komprehensif melalui langkah-langkah konstruktif (deradicalisation) sehingga dapat melakukan sinergi secara rapi dan tepat serta bergantung pada paradigma dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Kata kunci: Radicalism; Deradicalization; Higher level of education; Policy; Capitalism

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Nanang Martono mengatakan bahwa pendidikan adalah tema yang sangat menarik bagi manusia, karena pendidikan adalah sebuah lembaga vital sekaligus menyediakan investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu indikator kemajuan peradaban suatu bangsa. Maka sungguhlah luar biasa hal yang harus dihasilkan dari proses pendidikan. Melihat proses dan target yang harus dicapai, maka dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada suatu proses yang memiliki target indah dan mulia dibandingkan proses pendidikan. Tidak mengherankan jika Ki Hadjar Dewantoro menyebut relasi manusia dan pendidikan dengan moto *life long education* yang diartikan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan Tinggi Indonesia seakan tidak pernah berhenti untuk terus mengalami dinamika. Baik dinamika secara intelektual oleh para penghuninya, maupun berupa dinamika politik untuk mengaturnya. Bayangkan dengan jumlah ribuan PTN dan PTS yang ada di Indonesia sampai hari ini, akan tetapi masih belum mampu menampung setiap anak negeri untuk mengenyam pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di negeri yang konon katanya adalah negeri yang kaya nan subur akan sumber daya alamnya. Sangat lazim kita dengar bahwa para lulusan Sekolah tingkat Menengah di negeri ini sebagian besar tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi karena alasan tidak memiliki biaya dikarenakan biaya kuliah terbilang mahal bagi sebagian besar penduduk negeri ini yang mayoritas bekerja sebagai petani, pekerja informal dan buruh.

Persoalan akses, kualitas dan biaya kuliah murah senantiasa menjadi cita-cita setiap generasi muda negeri ini jika kita berbicara soal Pendidikan Tinggi. Di lapangan aksi penolakan, wacana privatisasi *sector* pendidikan sebagai agenda neoliberalisme di negeri ini kerap kita dengarkan melalui orasi para aktivis yang melakukan kampanye ataupun aksi protes untuk menolak regulasi UU PT ini.

Kapitalisasi berbagai sektor termasuk pendidikan diupayakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui regulasi perundang-undangan mulai dari UU Sisdiknas tahun 2002 yang mensyaratkan Pendidikan tinggi berbadan Hukum, UU BHP tahun 2009 yang telah dibatalkan oleh MK, serta terakhir UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 ini yang disinyalir juga berbau

liberalisasi dan privatisasi Perguruan Tinggi Indonesia yang dikhawatirkan akan mengkomersialisasikan (biaya mahal) pendidikan Indonesia yang memang hari ini sudah terasa mahal dan belum mampu diakses oleh setiap generasi di negeri ini. Terutama mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Cengkraman kapitalisme di sektor pendidikan tinggi inilah yang akan menjadi fokus dalam tulisan kali ini dalam kaca mata pemikiran teoritis kritis. Yakni mengenai tema dominasi dan hegemoni kapitalisme global terhadap Pendidikan Tinggi Indonesia.

Selain itu yang mampu masuk ke PTN yang telah penuh dengan persaingan adalah mereka dengan persiapan dan kemampuan akademik dan materi yang memang sudah menang. Jadi yang miskin dan punya akses yang kurang akan dengan mudah tersisih.<sup>1</sup> Inilah bentuk diskriminasi dan akhirnya dengan ketidakmampuan mengakses pendidikan tinggi, maka anak negeri yang tersisih tersebut akan menjadi pengangguran dan terus tersisih ditambah lagi ruang sosialnya yang terus tersumbat dan massifnya hegemoni media yang juga sangat diskriminatif dalam pencitraan representasinya.

Maka tersubordinasinya anak negeri yang tersisih tersebut dan Negara turut berperan dalam penyingkirannya dengan sistem yang dianutnya membuat dehumanisasi terhadap Anak Negeri tak tak terhindarkan. Teknologi, media, dan arus kuasa modal dan ideology kapitalisme yang sangat hegemonic melalui media massa dan iklan pun membuat mereka tersisih dan terus terjajah. Akses terhadap pendidikan sebagai pusat pengetahuan yang terhambat membuat kekuasaan untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia juga ikut tersingkir dan penjajahan atas Anak Negeri di pangkuan Ibu Pertiwi ini kembali berulang dan terus berlangsung. Inilah yang dimaksud oleh Michael Foucault sebagai *knowledge/power*. Pengetahuan dan kekuasaan tak dapat dipisahkan.

Radikalisasi di dalam sistem pendidikan dapat menstimulasi tumbuh-kembangnya asas-asas kapitalisme yang dipastikan terjadi harus dihadapi dengan cermat. Ini hanya bisa dilakukan, jika kita terlebih dahulu memahami bagaimana radikalisasi tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan baik bagi lembaga/institusi ataupun bagi peserta didik. Adapun proses untuk menanggapi kebijakan-kebijakan radikal pemerintah dalam mengimplementasikan sistem pendidikan di tanah air ini yang

---

<sup>1</sup> Revisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Pustaka Pelajar: 2006.h.30



kemudian akan lebih pantas kami sebut sebagai gerakan deradikalisasi. Namun sebelum mengulas bagaimana kritik terhadap sistem pendidikan yang berlaku saat ini, penulis akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan radikalisme dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi (PT).

### **B. Radikalisme pada Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi**

Radikalisme terminologi yang sering kali diasosiasikan dengan tingkatan paham dalam beragama di masyarakat, yang juga dipahami sebagai suatu gerakan sosial mengarah pada hal-hal yang negatif. Hingga sampai pada tingkatan tertentu, radikalisme dalam agama akhirnya menjalar ke aspek pendidikan, dimana salah satu atau beberapa elemen dalam pendidikan sering melakukan radikalisme yang menyebabkan teror atau rasa takut para elemen pendidikan untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Misalnya saja seorang dosen atau kepala program studi kurang maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pendidik hanya gara gara takut diancam pihak pihak lain yang dianggap merasa dirugikan. Akibatnya proses pendidikan dan proses kepemimpinan kurang sesuai harapan karena ada intervensi yang bersifat mengancam dari pihak pihak lain diluar pendidikan. Radikalisme bisa muncul dari berbagai elemen dalam pendidikan. Secara umum fenomena radikalisme dalam pendidikan lahir dari pemerintahan terhadap lembaga pendidikan baik swasta ataupun negeri. Bahkan dampak yang stimulant yang disebabkan radikalisasi pada dunia pendidikan diantaranya dapat menghadirkan persaingan tak sehat yang akan bermuara pada kapitalistis pendidikan.

Radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan secara menyeluruh dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan konstitusional, politis dan sosial yang berlaku. Setiap PT, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS) dituntut untuk mampu bersaing secara nasional dan internasional. Kenyataannya, sangat sulit mengharapakan PT kita mampu bersaing di tingkat internasional jika sistem yang diterapkan oleh pemerintah seperti saat ini, yaitu persaingan di antara PTN dengan PTN dan PTN dengan PTS. Di level nasional standar acuan persaingan tersebut disusun oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang menggunakan akreditasi sebagai alat ukur apakah suatu perguruan tinggi memenuhi unsur manajerial, teknis, dan administratif yang sudah sesuai dengan grade PT

berkualitas. Akhirnya seluruh PT berlomba-lomba mengejar akreditasi tertinggi (A) dengan berbagai cara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem akreditasi yang dijadikan acuan untuk menilai suatu perguruan tinggi tersebut, dengan mudah dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum penyelenggara PT. Akreditasi tidak lebih dari sekadar borang yang berisi aspek manajerial, teknis, dan administratif pengelolaan PT yang bisa direkayasa karena tidak memiliki basis otentisitas penilaian yang jelas dan terukur. Apalagi proses visitasi juga tidak sepenuhnya mampu mendeteksi validitas dan reliabilitas borang yang disusun oleh penyelenggara karena masalah metode visitasi dan praktik gratifikasi yang terjadi selama proses visitasi. Sistem penilaian seperti ini tentu tidak bisa menghasilkan penilaian yang valid dan reliabel. Tidak mengherankan jika ada program studi yang kekurangan dosen tetap, minim fasilitas, dan lemah dari sisi manajerial, tetapi tetap mendapatkan akreditasi B (Baik).

Kelemahan berikutnya dari sistem akreditasi yang didesain oleh Kemristekdikti adalah diterapkannya aturan yang seragam untuk seluruh PT di Indonesia. Setiap PT, tidak peduli negeri atau swasta, baru atau lama, favorit atau tidak, diadu dalam satu kompetisi dengan arena yang sama, regulasi yang sama, dan instrumen yang sama. Seharusnya dalam sistem akreditasi PT, ada kebijakan pengelompokan PT berdasarkan kluster-kluster tertentu dengan ukuran yang berbeda, seperti PT di wilayah Indonesia timur, tengah dan barat, baru dan lama, negeri dan swasta, serta PT sudah dan belum berdaya saing nasional dan internasional. Bagaimana mungkin perguruan tinggi baru atau swasta bisa bersaing dengan PTN/PTS yang sudah lama terbentuk jika diadu dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin PTN/PTS di Indonesia timur diadu dengan PTN/PTS di Indonesia barat yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif jauh jauh lebih besar. Hal ini dapat dikiasikan ibarat mengadu gajah dengan semut. Resolusinya, dalam mengimplementasikan konsep pendidikan hendaknya pemerintah memerhatikan sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan visi dan misi pendidikan yang sebenarnya. Semua elemen dalam proses pendidikan harus saling mendukung dan bersinergi secara positif sehingga akan melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.

### C. Deradikalisasi Melalui Revitalisasi Tujuan Pendidikan

Sekilas kita melihat adanya penyempitan tujuan pendidikan hanya semata sebagai pemenuh hasrat dalam mencapai klaim prestasi dari sebuah program studi atau kampus dengan predikat akreditasi tertinggi (A) yang dipercaya dapat mengangkat reliabilitas peserta didik lulusannya. Meskipun pada kenyataannya dunia kerja semakin membutuhkan manusia yang memiliki kualitas unggul, yang sesungguhnya amat sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada. Namun yang perlu dilakukan bukanlah mengubah kurikulum menjadi semakin dangkal (semakin teknis dan praktis semata), tetapi justru perlu menderadikalisasi kurikulum yang ada agar mampu setia dan dekat dengan tujuan pendidikan sejati yang telah ada. Perguruan tinggi berlomba mengubah kurikulum untuk mendapat status predikat A dari BAN PT, hal ini juga tentunya diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan dunia pasar kerja. Berbagai hal praktis yang harusnya bisa dipelajari sendiri juga dimasukkan ke dalam kurikulum untuk menarik siswa. Dunia bisnis dan industri pun meminta sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan ini. Bahkan mereka bersedia melakukan investasi.

Untuk merefleksikan masalah ini, saya rasa kita kembali harus ingat, apa tujuan dasar dari diselenggarakannya pendidikan. Untuk ini perlu adanya istilah yang dapat merumuskan kedalam senja pemahaman teoretis yakni **tiga P**, yang memiliki kepanjangan sebagai Pembebasan, Pendewasaan, dan Penyadaran. Penalaran ini dapat kita jumpai dalam mayoritas pemikiran Paulo Freire, seorang filsuf Amerika Selatan yang pemikirannya dapat meresolusi kendala pendidikan di masa pasca modern seperti saat ini.

**P** pertama adalah pembebasan, yakni usaha institusi pendidikan untuk melepaskan anak didik dari kebodohan dan kemiskinan. Anak jadi memahami pengetahuan dasar, dan tidak diperbodoh oleh lingkungan. Anak juga bisa mengatur dirinya sendiri, memiliki ketrampilan, sehingga bisa hidup dan bekerja secara maksimal, serta lepas dari jaring-jaring kemiskinan.

**P** Kedua adalah pendewasaan, yakni usaha institusi pendidikan untuk membuat anak didik mampu berpikir rasional di dalam hidupnya, dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Berpikir rasional berarti anak didik untuk diajak melakukan analisis dari semua pengalaman maupun masalah yang dihadapinya. Bertanggung jawab berarti ia berani mengaku salah, bila ternyata ia berbuat salah dalam hidupnya.

**P** ketiga adalah kesadaran, yakni usaha untuk membawa anak didik sadar akan posisinya di dalam masyarakat, dan apa yang bisa sungguh diperbuatnya untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi semua. Anak didik diminta untuk peka pada situasi sekitarnya. Ia diajak untuk bisa menempatkan diri secara tepat di dalam komunitasnya.

Inilah **Tiga P** yang merupakan tujuan dari pendidikan. Yang kita perlukan adalah radikalisi pendidikan untuk mewujudkan **ketiga P** tersebut. Yang harus kita hindari adalah pendangkalan kurikulum pendidikan menjadi teknis dan praktis semata. Hanya dengan begitu pendidikan bisa menyediakan tenaga kerja yang bermutu bagi industri dan bisnis, sekaligus mampu membentuk anak didik menjadi manusia yang seutuhnya.

#### **D. Deradikalisasi Melalui Merevitalisasi Paradigma Pendidikan**

Istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Amerika Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution* (1962) dan kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs dalam bukunya *Sociology of Sociology* (1970). Menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh *Mode of Thought* atau *Mode of Inquiry* tertentu, yang kemudian menghasilkan *Mode of Knowing* yang spesifik.

Menurut Kuhn yang dikutip George Ritzer, paradigma adalah gambaran fundamental dari pokok bahasan dalam ilmu pengetahuan. Dia menentukan apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diajukan, dan aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban-jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit terluas dari konsensus dalam ilmu pengetahuan dan membedakan satu komunitas ilmiah dari yang lain. Ia memasukkan, mendefinisikan, dan menghubungkan sejumlah contoh, teori dan metode serta instrument yang ada didalamnya.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan paradigma adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, selain dipergunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Konstelasi teori ini

---

<sup>2</sup> Dalam: <http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma-definisi-paradigma.html> (<http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma-definisi-paradigma.html>), diakses, 4 Juni 2012.



dikembangkan dalam rangka memahami kondisi sejarah dan keadaan sosial untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial.<sup>3</sup>

Secara konseptual, ada tiga paradigma pendidikan<sup>4</sup> yang dapat memberi peta pemahaman mengenai paradigma apa yang menjadi pijakan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yang berdampak sangat serius terhadap perubahan sosial.<sup>5</sup>

*Pertama*, paradigma konservatif. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa ketidaksederajatan masyarakat merupakan suatu keharusan alami, mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau takdir Tuhan. Perubahan sosial bagi mereka bukanlah suatu yang harus diperjuangkan, karena perubahan hanya akan membuat manusia lebih sengsara saja. Pada dasarnya masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan atau memengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhan-lah yang merencanakan keadaan masyarakat dan hanya Dia yang tahu makna dibalik itu semua.<sup>6</sup> Dengan pandangan seperti itu, kaum konservatif tidak menganggap rakyat memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka. Mereka yang menderita, yakni orang-orang miskin, buta huruf, kaum tertindas dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena toh banyak orang yang bisa bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang bersekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran mereka datang, karena akhirnya semua orang akan mencapai kebebasan dan kebahagiaan kelak. Paham konservatif hanya melihat pentingnya harmoni serta menghindari konflik dan kontradiksi.

*Kedua*, paradigma pendidikan Liberal. Kaum Liberal, mengakui bahwa memang ada masalah di masyarakat. Namun bagi mereka pendidikan sama sekali steril dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Tugas pendidikan cuma menyiapkan murid untuk masuk dalam sistem yang ada. Sistem diibaratkan sebuah tubuh manusia yang senantiasa berjalan harmonis dan penuh keteraturan (*functionalism structural*).<sup>7</sup> Kalaupun terjadi distorsi maka

<sup>3</sup> Devinisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. *Paradigm*. Grand Forks: University North Dakota, 1970.

<sup>4</sup> Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, (Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001), h. 33

<sup>5</sup> Dilema Paradigma Pendidikan, Sumber, Kompilasi Makalah Terpilih, Litbang Bulaksumur Pos 1999-2000, h. 25

<sup>6</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri: "membentuk solidaritas organik"*. Buku Panduan Pelatihan Basis PMII.

<sup>7</sup> Suwarsono & Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, (LP3ES, Jakarta, 1994),

yang perlu diperbaiki adalah individu yang menjadi bagian dari sistem dan bukan sistem. Akar dari pendidikan semacam ini dapat ditelusuri dari pijakan filosofisnya yakni, paham liberalisme, suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, kehendak (*will*) melindungi hak, dan kebebasan (*freedoms*)<sup>8</sup> serta proses perubahan sosial secara inskriminal demi menjaga stabilitas jangka panjang.

*Ketiga*, adalah paradigma pendidikan kritis. Pendidikan bagi paradigma kritis merupakan arena perjuangan politik. Jika bagi kaum konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal ditujukan untuk perubahan moderat dan acapkali juga pro status quo, maka bagi penganut paradigma kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam tatanan politik ekonomi masyarakat dimana pendidikan berada. Dalam perspektif ini, pendidikan harus mampu membuka wawasan dan cakrawala berpikir baik pendidik maupun peserta didik, menciptakan ruang bagi peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis diri dan struktur dunianya dalam rangka transformasi sosial. Perspektif ini tentu mempunyai beberapa syarat, baik guru maupun peserta didik mesti berada dalam posisi yang egaliter dan tidak saling mensubordinasi. Masing-masing pihak, mesti berangkat dari pemahaman bahwa masing-masing mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah dialog, saling menawarkan apa yang mereka mengerti dan bukan menghafal, menumpuk pengetahuan namun terasing dari realitas sosial (*Banking Concep Of Education*).

### E. Kesimpulan

Misi suci pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam semboyan Perguruan Tinggi (PT), yaitu melaksanakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Namun, melihat realitas yang ada saat ini akan sulit rasanya PT kita mampu mengimplementasikan Tiga Dharma itu dengan baik. Insitusi pendidikan pada dasarnya merupakan tempat untuk memanusiakan manusia. Artinya bahwa ada upaya-upaya nyata, sadar dan sistematis yang dilakukan secara terus menerus untuk merubah kualitas pendidikan dan karakter bangsa yang lebih baik. Radikalisme dalam pendidikan memiliki potensi ancaman yang bersifat futuristik mewujudkan

---

<sup>8</sup> Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan; Menggadaikan Kecerdasan Kebutuhan Bangsa*". (Pinus Book Publisher; 2008), h.105

kelangsungan kualitas pendidikan. Radikalisme bisa muncul kapan saja, dari mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah melalui berbagai kebijakan Permenistek Dikti. Oleh sebab itu, radikalisme perlu di sikapi secara utuh dan komprehensif melalui langkah-langkah konstruktif (deradikalisasi) sehingga dapat melakukan sinergi secara rapi dan tepat serta bertumpu pada paradigma dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.[]

#### Daftar Pustaka

- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Dalam:<http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma-definisi-paradigma.html>  
(<http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma-definisi-paradigma.html>), diakses, 4 Juni 2012.
- Thomas Popkewitz, *Paradigm*, Grand Forks: University North Dakota, 1970.
- Dilema Paradigma Pendidikan, Sumber, Kompilasi Makalah Terpilih, Litbang Bulaksumur Pos 1999-2000
- Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Manifesto Wacana Kiri: Membentuk solidaritas organik*". Buku Panduan Pelatihan Basis PMII.
- Mu'arif, *Liberalisasi Pendidikan; Menggadaikan Kecerdasan Kebidupan Bangsa*", Pinus Book Publisher, 2008
- Revisond Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2006
- Suwarsono & Alvin Y. So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1994

# Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional

---

ORIGINALITY REPORT

---

99%

SIMILARITY INDEX

99%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

---

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

100%

★ e-journal.metrouniv.ac.id

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off